

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Sistem pendidikan di Indonesia pada tahun 2013 merupakan sejarah baru dalam penerapan kurikulum karena kurikulum yang digunakan dalam satu wilayah menggunakan dua model yaitu Kurikulum 2013 dan KTSP 2006. Ketidaktegasan dari Pemerintah ini membuat para guru di Indonesia mengalami kebingungan. Sekolah sebagai pelaksana pendidikan, baik pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan non guru, maupun peserta didik sangat berkepentingan dan akan terkena imbasnya secara langsung dari setiap perubahan kurikulum. Di samping itu, orang tua, dan masyarakat pada umumnya, dunia usaha dan dunia industri, serta para birokrat, baik di pusat maupun daerah akan terkena dampak dari perubahan kurikulum tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung dan ini adalah merupakan suatu kebijakan dan kebijakan itu ada pada pemerintah yang memiliki tujuan tertentu.

A. Landasan Teori

1 Konsep Implementasi

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Kebijakan publik adalah proses penentuan pengambilan keputusan tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah dan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Secara politik, kebijakan publik merupakan proses penentuan alokasi untuk menentukan siapa yang memperoleh apa, kapan, dan bagaimana (Afan Gaffar,

2009: 158). Pelaksanaan implementasi akan berlangsung apabila ada rumusan yang jelas..

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi menurut Lester dan Stewart dalam Solahuddin Kusumanegara (2010: 97) adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administratif. Menurut James Anderson dalam Solahuddin Kusumanegara (2010: 97) menyatakan bahwa implementasi kebijakan/program merupakan bagian dari proses administrasi, sebagaimana diistilahkan oleh Anderson, digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang terjadi pada setiap saat. Proses administrasi mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi dan dampak suatu kebijakan.

Selain pengertian di atas, menurut Solahuddin Kusumanegara (2010: 98), implementasi kebijakan dipahami juga sebagai suatu proses, *output*, dan *outcome*. Implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai proses karena di dalamnya terjadi beberapa rangkaian aktivitas yang berkelanjutan. Sebagai contohnya pada awal setelah status kebijakan ditetapkan, para legislator melakukan *hearing* dengan lembaga-lembaga terkait dengan kebijakan yang dibuat. Setelah itu aparat birokrasi menetapkan rutinitas untuk melaksanakan aturan yang telah dibuat.

Ada empat konteks implementasi dalam hal pengimplementasi kebijakan: implementasi yang dipandu, diarahkan, didelegasikan, dan implementasi sendiri (Riant Nugroho, 2015: 236). Menurut Anderson, Lester dan Stewart (Solahuddin

Kusumanegara, 2010: 100) dalam tahap implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat. Mereka bisa berasal dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, dan diidentifikasi berasal dari kalangan birokrasi, legislasi, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan, dan organisasi-organisasi komunitas. Oleh karena itu, implementasi kebijakan menganggap bahwa pemerintah mempunyai segalanya untuk mengelola kehidupan publik (Riant Nugroho, 2015: 236).

1) Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Dalam menjalankan sebuah kebijakan untuk mendapatkan dampak dan tujuan yang diinginkan, penerapan sebuah kebijakan perlu dilihat dari definisi yang lebih luas yaitu perangkat administrasi hukum yang mana para actor, organisasi, teknik dan prosedur bisa berjalan bersama (Budi Winarno, 2014:147).

Solichin Abdul Wahab (2005: 71-78) mengutarakan teori yang diungkapkan oleh Lewis A. Gun dan Brian W. Hogwood dalam teori implementasinya antara lain :

- a) Waktu dan tersedianya sumber yang cukup dalam mengimpelentasikan program
- b) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh agen pelaksana atau agen pelaksana tidak akan memiliki masalah atau hambatan serius. Hambatan-hambatan ini dapat berupa fisik, politik, dan lainnya
- c) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- d) Campuran sumber benar bisa didapati
- e) Kebijakan yang hendak diterapkan berdasar pada hubungan sbab akibat yang teruji.

- f) Interaksi saling ketergantungan kecil
- g) Sepakat terhadap tujuan dan bersama memahaminya
- h) Rincinya tugas dan penempatan yang sesuai
- i) Pihak yang berkuasa dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
- i) Sempurnanya koordinasi dan komunikasi

Parson (2008: 482) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi relatif tidak sulit apabila kebijakan bersifat distributif, kebijakan regulatifnya moderat, dan kebijakan redistributifnya rendah. Dalam implementasi biasanya ada pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan (Dwiyanto Indiahono, 2009: 143). Menurut Teori Implementasi Kebijakan oleh Budi Winarno (2014: 178 – 206), implementasi kebijakan akan dikukung oleh faktor sebagai berikut :

- a) Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya telah dikeluarkan.

Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. ketiga

aspek pendukung dalam pelaksanaan sebuah kebijakan yaitu kejelasan dalam perintah harus jelas dan konsisten.

b) Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan ini meliputi: staf dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas, wewenang dan fasilitas mereka untuk mendukung pelaksanaan layanan publik.

c) Struktur birokrasi.

Birokrasi adalah salah satu organ yang paling umum, bahkan secara keseluruhan, menerapkan kebijakan, baik struktur pemerintah maupun organisasi swasta.

d) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi- konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

Faktor-faktor yang mendukung menurut Budi Winarno (2014: 159 -169), terhadap proses implementasi kebijakan dijabarkan sebagai berikut.

a) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan. Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak bisa dicapai apabila tujuannya tidak dipertimbangkan.

- b) Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
- c) Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan
- d) Komunikasi antara organisasi dan kegiatan implementasi dapat efektif jika disertai dengan keakuratan komunikasi antara mereka yang bertanggung jawab untuk implementasi.
- e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat memengaruhi lembaga pelaksana dalam menerapkan kebijakan.
- f) Sumber kebijakan, yang dimaksud meliputi dana atau insentif lain yang mendorong dan memfasilitasi implementasi yang efektif.

Pemerintah membuat kebijakan tidak hanya untuk dirinya saja , melainkan ditujukan untuk masyarakat di lingkungan sekitarnya. Bambang Sunggono (1994: 144) mengutip James Anderson, penyebab masyarakat mengikuti kebijakan publik yaitu :

- a) Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.
- b) Sikap menerima dan menerapkan kebijakan publik karena politik lebih sejalan dengan kepentingan pribadi;
- c) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;

- d) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
- e) Penghormatan terhadap anggota masyarakat berhadapan dengan otoritas dan keputusan lembaga pemerintah;

2) Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Penghambat implementasi kebijakan menurut Bambang Sunggono (1994: 149-153) , sebagai berikut:

1) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa pemegang peran yang bersangkutan memiliki secara langsung informasi yang diperlukan atau berkaitan erat untuk memainkan peran mereka dengan benar. Informasi ini tidak ada, misalnya karena masalah komunikasi.

2) Pembagian Potensi

Ini karena kegagalan untuk mengimplementasikan kebijakan publik juga ditentukan oleh aspek berbagi potensial antara para aktor yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk membedakan tugas dan kekuatan organisasi pelaksana. Struktur organisasi implementasi dapat menjadi masalah jika pembagian kekuasaan dan tanggung jawab kurang cocok dengan pembagian tugas atau ditandai oleh pembatasan yang tidak jelas.

3) Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci,

sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

4) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kebijakan kontroversial mendapatkan banyak penolakan masyarakat dalam pelaksanaannya khususnya ada penyesuaian waktu. Bambang Sunggono (1994 : 144-145), menyebutkan mengapa masyarakat tidak melaksanakan sebuah kebijakan publik, diantaranya:

- a) Jika suatu kebijakan sangat bertentangan (kontradiktif) dengan sistem nilai yang diadopsi oleh masyarakat pada umumnya atau oleh kelompok masyarakat tertentu.
- b) Ada ketidakpastian hukum atau "ukuran" kebijakan yang tidak jelas yang mungkin bertentangan, yang mungkin menjadi sumber ketidakpatuhan terhadap hukum atau kebijakan publik.

- c) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- d) Karena anggota komunitas suatu kelompok atau perkumpulan memiliki ide atau gagasan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan hukum dan keinginan pemerintah;
- e) Konsep ketidakpatuhan selektif, di mana ada beberapa undang-undang dan peraturan atau kebijakan publik yang kurang ketat untuk individu;

Makinde (Erwan Agus Purwanto & Sulistyastuti, 2012: 85) mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam implementasi di negara-negara berkembang. Berdasarkan data yang diperoleh penghambat implementasi disebabkan antara lain:

- a) Kelompok sasaran tidak terlibat dalam implementasi program
- b) Program yang diimplementasikan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.
- c) Adanya korupsi
- d) Sumberdaya manusia yang kapasitasnya rendah
- e) Tidak adanya koordinasi dan monitoring.

Dari beberapa sebab di atas apabila tidak dilakukan perbaikan sistem dengan baik maka kebijakan tersebut akan susah dilaksanakan. Oleh karena itu faktor-faktor tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu supaya bisa berjalan dengan baik. Pemegang kebijakan harus melakukan penelitian terdahulu supaya dapat

menentukan sasaran utamanya dengan mempertimbangkan aspek demografi, meningkatkan SMPM dengan pelatihan-pelatihan dan meningkatkan koordinasi antar lembaga pendukungnya.

3) Cara Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Kebijakan

Aturan perundangan adalah sarana untuk pelaksanaan kebijakan publik. Sebuah kebijakan menjadi efektif bila waktu membuat dan melaksanakannya mendapatkan waktu dan perangkat yang mencukupi. Elemen-elemen yang harus dipenuhi agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan benar, menurut Erwan Agus Purwanto & Sulistyastuti (2012: 86-87) yaitu :

- a. Kualitas kebijakan, kualitas disini akan menyangkut banyak hal diantaranya kejelasan tujuan, kejelasan implementator atau penanggungjawab implementasi.
- b. Kecukupan input kebijakan. Suatu kebijakan atau program tidak akan dapat mencapai tujuan atau sasaran tanpa dukungan anggaran yang memadai.
- c. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hadiah, dll)
- d. Kapasitas implementator (struktur, organisasi, dukungan SMPM, koordinasi, pengawasan, dsb)
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)

- f. Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi, dan politik di mana implementasi tersebut dilakukan.

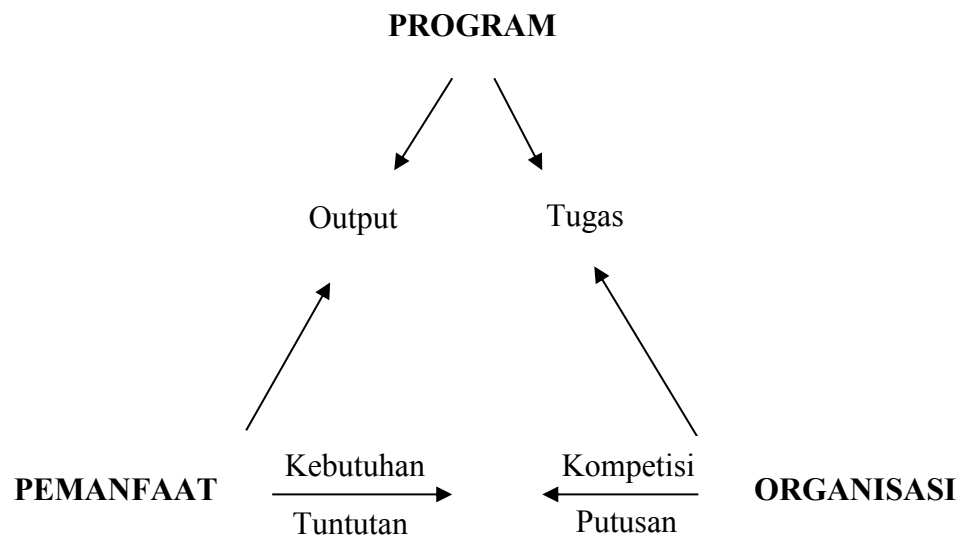
b. Implementasi Program

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan program sebagai rancangan tentang prinsip-prinsip serta usaha yang dapat dijalankan. Program adalah salah satu komponen dari sebuah kebijakan (Arif Rohman, 2009: 101-102). Program adalah cara yang berwenang untuk mencapai sebuah tujuan. Menurut Siti Erna Latifi Suryana (2009: 28) setidaknya terdapat tiga buah pilar kegiatan mengoperasikan program diantaranya :

- 1) Aplikasi atau aplikasi harus memiliki prosedur kerja yang jelas sehingga program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan, agar tidak bertentangan dengan program lain.
- 2) Interpretasi pelaksana harus dapat melaksanakan program sesuai dengan instruksi teknis dan instruksi implementasi, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- 3) Diperlukan pengorganisasian struktur organisasi yang jelas dalam pengoperasian program sehingga staf pelaksana dapat dilatih dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

Model implementasi program salah satunya adalah model yang dijelaskan oleh David C. Korten (Haidar Akib dan Tarigan, 2008: 12). Model ini lebih dikenal

sebagai model kesesuaian implementasi program, model kecukupan Korten dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 1. Model Kesesuaian Implementasi Program
Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2008: 12)

Model ini digambarkan oleh Korten dengan tiga elemen inti berada dalam implementasi program; program itu sendiri, kelompok sasaran program, dan pelaksanaan program. Sebuah program sukses dilaksanakan apabila ada kesesuaian dari tiga elemen implementasi program. Pertama, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Kedua, kepatuhan pengguna program, yaitu kompatibilitas antara apa yang ditawarkan oleh program dan apa yang dibutuhkan kelompok sasaran (pemanfaat). Ketiga, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh

program dengan kemampuan organisasi pelaksana (Haedar Akib dan Antonius Tarigan, 2008: 12).

Menurut model yang dikembangkan oleh Korten, bisa dipahami bahwa apabila tidak ada kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, maka program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Penyebabnya bila hasil dari program tidak sesuai dengan yang dibutuhkan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Supaya program dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana yang dibuat maka ketiga unsur implementasi harus dipenuhi. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program.

Maryono (2010: 43) dalam bukunya yang berjudul Menakar Kebijakan RSBI: Analisis Kritis Studi Implementasi Terkait landasan dan mutu implementasi, implementasi sudah terlaksana dengan baik maka perlu ada yang diperhatikan, yaitu:

- 1) Sudahkah aktor pelaksana kebijakan mengerti akan rencana, tujuan, dan sasaran kebijakan?
- 2) Apabila hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab telah diberikan, dipahami dan diimplementasikan dengan benar oleh pelaksana kebijakan?

- 3) Sudahkah aktor-aktor kunci diidentifikasi dan apakah mereka siap untuk mengambil tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan?
- 4) Benarkah unit pelaksana teknis telah disiapkan?
- 5) Sudahkah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik?

2. Kurikulum

a. Pengertian Kurikulum

Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar-mengajar (Nana Syaodih, 2009: 5). Pengertian tersebut juga sejalan dengan pendapat Nasution (2006 : 5) yang menyatakan bahwa kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19, menjelaskan bahwa kurikulum merupakan satu perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Biasanya kurikulum dibedakan antara kurikulum sebagai rencana dengan kurikulum yang fungsional. Rencana tertulis merupakan dokumen kurikulum, sedangkan kurikulum yang dioperasikan di dalam kelas merupakan kurikulum fungsional (Nana Syaodih, 2009: 5). Secara etimologis, istilah kurikulum

(*curriculum*) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang berarti pelari dan *curure* yang berarti tempat lomba. (Zainal Arifin, 2012 : 2). Selanjutnya, pengertian lain mengenai kurikulum menurut Mbachu & Ebiere (2014: 28), menyatakan bahwa:

Education is seen as an instrument “per excellence” for effecting national development. Education is seen as a means of developing potentialities and capacity building. Any educational Curriculum that aims at developing human potentials must target at functionality. Functionality here refers to curriculum that is designed to teach students skills that will enable them function as competent and acceptable adults.

Dari berbagai macam definisi kurikulum yang telah diuraikan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa kurikulum merupakan perangkat yang dipakai sebagai referensi dalam mencapai keberhasilan dari tujuan pembelajaran didalam pendidikan itu sendiri yaitu membentuk dan menumbuhkan potensi peserta didik. Kurikulum sendiri bersifat dinamis, artinya kurikulum sendiri harus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, tingkat kecerdasan peserta didik, budaya, sistem nilai serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum harus selalu dimonitoring dan dievaluasi implementasinya untuk perbaikan dan penyempurnaan.

b. Kurikulum 2013

Menurut Mulyasa (2014 : 6) kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menekankan kepada *character building* (pembangunan karakter), terutama pada tingkat dasar yang akan dapat menjadi pijakan pada tingkat berikutnya. Dengan mengembangkan kurikulum 2013 berdasarkan karakter dan kompetensi, kita berharap bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang memiliki nilai tawar yang dapat bersaing dengan negara-negara lain di dunia..

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Kurikulum ini menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang diterapkan sejak 2006 lalu. Dalam Kurikulum 2013 mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di satu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang Pendidikan.

Permendikbud No. 37 Tahun 2018 yang mendeskripsikan Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama setidaknya K13 memiliki empat kompetensi inti (KI) yang berisi tujuan dari proses pembelajaran yaitu :

- 1) Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk sikap spiritual;
- 2) Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk sikap sosial;
- 3) Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk pengetahuan; dan
- 4) Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk keterampilan.

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berdasarkan karakter dan kompetensi (Mulyasa, 2013: 163). Kurikulum 2013 tidak hanya menekankan kompetensi siswa, tetapi juga pembentukan karakter. Menurut kompetensi dasar (KI) yang telah ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, KI 1 dan KI 2 terkait

dengan tujuan pembentukan karakter siswa, sedangkan KI 3 dan KI 4 terkait dengan penguasaan kompetensi siswa.

Menurut Mulyasa (2014: 170 -171) bahwa kurikulum 2013 memiliki konsep yang berbeda dari kurikulum sebelumnya yaitu adanya *scientific approach*. Pendekatan saintifik berkaitan erat dengan metode saintifik. Metode saintifik (ilmiah) pada umumnya melibatkan kegiatan pengamatan atau observasi yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis atau mengumpulkan data. Metode ilmiah pada umumnya dilandasi dengan pemaparan data yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Oleh sebab itu, kegiatan percobaan dapat diganti dengan kegiatan memperoleh informasi dari berbagai sumber.

Dalam proses pembelajaran di Kurikulum 2013 ini buku dan sarana prasarana juga sangat diperhatikan sekali oleh Pemerintah dengan di masukan pada komponen daya dukung yang tertera dalam Permendikbud No 103 Tahun 2014 (2014:11) yaitu proses pembelajaran membutuhkan daya dukung dalam bentuk ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pembelajaran. Fasilitas yang mencakup furnitur, bahan pengajaran, bahan pendidikan, buku dan sumber daya pendidikan lainnya, bahan habis pakai dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Infrastruktur meliputi lahan, ruang kelas, ruang manajemen, ruang pengajaran, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, bengkel, unit produksi , ruang makan, instalasi dan layanan listrik, fasilitas olahraga, tempat ibadah dan taman bermain. , tempat penciptaan dan ruang / tempat lain yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Dan khusus untuk buku teks juga telah diatur dalam peremendikbud No. 22 tahun 2016 dengan bunyi “sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan (2016: 5)”.

Kurikulum 2013 ini juga di atur dengan beberapa permen yang telah mengalami perbaikan antara lain tentang kompetensi lulusan dengan peremendikbud No 37 tahun 2018 (2018: 3-8) yang isinya seperti yang digambarkan oleh tabel di bawah :

Tabel 1. Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan SMP/MTs
Permendikbud No 37 tahun 2018 (2018 : 3-8)

Dimensi Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: <ol style="list-style-type: none"> 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, 2. berakarakter, jujur, dan peduli, 3. bertanggungjawab, 4. pembelajar sejati sepanjang hayat, dan 5. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara.
Dimensi Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. ilmu pengetahuan, 2. teknologi, 3. seni, dan 4. budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
Penjelasan Faktual	Pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
Penjelasan Konseptual	Terminologi/ istilah dan klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi dan teori, yang digunakan terkait dengan pengetahuan teknis dan spesifik

	tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
Penjelasan Prosedural	Pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, algoritma, metode tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional
Penjelasan Metakognitif	Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
Dimensi Keterampilan	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak: <ol style="list-style-type: none"> 1. kreatif, 2. produktif, 3. kritis, 4. mandiri, 5. kolaboratif, dan 6. komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri.

Gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antara tingkat pendidikan memperhitungkan ; 1) perkembangan psikologis anak; 2) lingkup dan kedalaman; 3) kesinambungan; 4) fungsi satuan pendidikan; dan 5) lingkungan.

c. Struktur Kurikulum dan Beban Belajar

1) Struktur Kurikulum

Kurikulum 2013 memiliki struktur yang berbeda dengan kurikulum yang diterapkan sebelumnya. Struktur K13 SMP/MTs terdiri kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran. Struktur kurikulum SMP/MTs berdasarkan Permendikbud Nomor 35 tahun 2018 (2018:

7) tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dijelaskan berikut ini.

a) Kompetensi Inti

Kompetensi Inti Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik SMP/MTs pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas. Melalui kompetensi inti, sinkronisasi horisontal berbagai kompetensi dasar antarmata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut :

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk sikap spiritual;
2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk sikap sosial;
3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk pengetahuan; dan
4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk keterampilan.

Selanjutnya untuk uraian tentang Kompetensi Inti untuk jenjang

SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut ini. (2018:6-8)

Tabel 2. Kompetensi Inti Kelas VII, VIII, dan IX SMP/MTs.

KOMPETENSI INTI KELAS VII	KOMPETENSI INTI KELAS VIII	KOMPETENSI INTI KELAS IX
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan

		pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata	3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata	3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori	4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori	4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

b. Mata Pelajaran

Tabel 3. Alokasi Waktu Mata Pelajaran SMP/MTs (2018: 8)

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU PER MINGGU		
		VII	VIII	IX
Kelompok A (Umum)				
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3.	Bahasa Indonesia	6	6	6
4.	Matematika	5	5	5
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7.	Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B (Umum)				
1.	Seni Budaya	3	3	3
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	3	3	3
3.	Prakarya dan/atau Informatika	2	2	2
Jumlah jam pelajaran per minggu		38	38	38

Keterangan:

- 1) Mata pelajaran Kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat.
- 2) Mata pelajaran Kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan/konten lokal.
- 3) Mata pelajaran Kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri
- 4) Muatan lokal dapat memuat Bahasa Daerah.
- 5) Satu jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 40 (empat puluh) menit.
- 6) Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri, paling banyak 50% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.
- 7) Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta faktor lain yang dianggap penting, namun yang diperhitungkan Pemerintah, maksimal 2 (dua) jam/minggu.
- 8) Untuk Mata Pelajaran Seni Budaya satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester, aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya.
- 9) Untuk Mata Pelajaran Prakarya dan/atau Mata Pelajaran Informatika, satuan pendidikan menyelenggarakan salah satu atau kedua mata pelajaran tersebut. Peserta didik dapat memilih salah

- satu mata pelajaran yaitu Mata Pelajaran Prakarya atau Mata Pelajaran Informatika yang disediakan oleh satuan pendidikan.
- 10) Dalam hal satuan pendidikan memilih Mata Pelajaran Prakarya, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester, aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya.
 - 11) Khusus untuk Madrasah Tsanawiyah struktur kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh Kementerian Agama.
 - 12) Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas Pendidikan Kepramukaan (wajib), usaha kesehatan sekolah (UKS), palang merah remaja (PMR), dan lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan pendidikan.

c. Kompetensi Dasar

Berdasarkan Permendikbud No. 35 Tahun 2018 (2018 : 10), Kompetensi Dasar dirumuskan untuk mencapai Kompetensi Inti. Rumusan Kompetensi Dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik, dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Kompetensi Dasar meliputi empat kelompok sesuai dengan pengelompokan Kompetensi Inti sebagai berikut:

- (1) kelompok 1 : kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1;
- (2) kelompok 2 : kelompok Kompetensi Dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2;
- (3) kelompok 3 : kelompok Kompetensi Dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3; dan
- (4) kelompok 4 : kelompok Kompetensi Dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4.

2) Beban Belajar

Permendikbud No. 35 Tahun 2018 (2018 : 9), seluruh kegiatan yang diikuti oleh peserta didik dalam waktu sepekan, satu semester, dan satu tahun

pembelajaran disebut sebagai beban belajar. Beban belajar di SMP/MTs dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu. Beban belajar satu minggu adalah minimal 38 (tiga puluh delapan) jam pelajaran. Beban belajar di Kelas VII, VIII, dan IX dalam satu semester paling sedikit 18 (delapan belas) minggu efektif. Beban belajar di kelas IX pada semester ganjil paling sedikit 18 (delapan belas) minggu efektif. Beban belajar di kelas IX pada semester genap paling sedikit 14 (empat belas) minggu efektif.

d. Implementasi Kurikulum 2013

Menurut Mulyasa (2014: 99) bahwa Tema kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang: produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut untuk professional merancang pembelajaran efektif dan bermakna (menyenangkan), mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan seperti yang tertera di bawah ini.

Tabel 4. Karakteristik Pembelajaran SMP/Mts
permendikbud No 37 tahun 2018 (2018: 3)

Keterampilan	Sikap	Pengetahuan
Mengamati	Menerima	Mengingat
Menanya	Menjalankan	Memahami
Mencoba	Menghargai	Menerapkan
Menalar	Menghayati,	Menganalisis
Menyaji	Mengamalkan	Mengevaluasi
Mencipta		

Implementasi kurikulum dalam pendidikan teknis adalah upaya kelas/workshop atau laboratorium dari guru dan peserta didik untuk dimasukkan ke dalam kegiatan untuk menjadi dokumen kurikulum dalam lingkungan sekolah (Essien, Okure, & Emmanuel, 2013: 156). Menurut Mugisha dan Mugimu (2013: 105) desain kurikulum kontemporer dan implementasi memerlukan penggunaan praktek-praktek pendidikan yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar mengajar secara baik. Implementasi ini supaya berjalan dengan baik maka harus ada identifikasi kebutuhan pada kurikulum tersebut antara lain tentang inovasi apa yang diperlukan, mengetahui karakteristik guru, mengetahui kebutuhan pelatihan guru, membutuhkan fasilitator dari luar apa tidak serta apa hambatan guru dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut.

Implementasi kurikulum tersebut supaya dapat terwujud dengan baik, salah satunya adalah guru dituntut untuk secara professional merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses belajar mengajar. Penjelasan setiap kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Pembelajaran Kurikulum

Perencanaan adalah proses sistematis dalam membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan di masa depan (Abdul Majid, 2013: 16). Perencanaan berarti menyusun langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tertentu (Abdul Majid, 2013: 16). Sehingga disimpulkan perencanaan adalah langkah-langkah yang harus diikuti untuk menerapkan kebijakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang diberikan.

Pada dasarnya perencanaan pembelajaran menurut silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) didasarkan pada Permendikbud Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 yang telah diganti dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 (2016: 5) tentang Standar Proses Pendidikan dasar dan Menengah yang mengatakan bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

Rencana dalam pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran sudah menyesuaikan dengan Silabus dan RPP.

a) Silabus

Menurut Permendikbud No 22 tahun 2016 (2016: 5), “Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran”. Sedangkan menurut Abdul Majid (2013: 39) “Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar”.

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 65 Tahun 2013 dan telah diperbarui menjadi Permendikbud No 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah Bab III perencanaan pembelajaran (2016: 5), dalam silabus sedikitnya memuat hal berikut :

- a) Identitas mata pelajaran (khusus SMP/MTS/SMPLB/Paket B dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/ Paket C Kejuruan);
- b) Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas;
- c) Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari siswa untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran;
- d) Kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran;
- e) Tema (khusus SMP/MI/SMPLB/Paket A);
- f) Materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi;
- g) Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan;
- h) Penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik;
- i) Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan
- j) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.

Pengembangan silabus didasarkan pada SKL dan Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan disesuaikan dengan mekanisme pembelajaran yang ada setiap tahun pelajaran. Acuan dalam pengembangan RPP adalah silabus itu sendiri.

b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RPP disiapkan oleh setiap guru dan pengembangan rencana pelajaran dapat dilakukan pada awal setiap semester atau pada awal tahun ajaran.

Diharapkan RPP akan siap pada awal pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan rencana pelajaran dapat dilakukan secara mandiri atau berkelompok, berdasarkan Peraturan No. 81 A tahun 2013 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang implementasi program pelatihan. mengajar, yang menetapkan itu :

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan (2013: 5).

Permendikbud ini sekarang telah diperbarui dengan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang menyatakan bahwa:

“Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri dan/atau berkelompok di sekolah/madrasah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah. Pengembangan RPP dapat juga dilakukan oleh guru secara berkelompok antarsekolah atau antarwilayah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh dinas pendidikan atau kantor kementerian agama setempat” (2014: 7).

Selama pelaksanaannya, berbagai prinsip harus diperhitungkan dalam penjabaran dan penyusunan RPP, berdasarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 81A dari 2013, tentang implementasi program studi. Berbagai prinsip untuk mengembangkan atau menyusun rencana pelajaran (2013: 38) berikut penjelasannya :

- a) RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan.
- b) RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan awal siswa, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan social, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus,

- kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan siswa, mendorong partisipasi aktif siswa.
- c) Proses pembelajaran dalam RPP dirancang dengan berpusat pada siswa untuk mengembangkan kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar dan kebiasaan belajar.
 - d) Mengembangkan budaya membaca dan menulis.
 - e) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut.
 - f) RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
 - g) Keterkaitan dan keterpaduan, RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
 - h) RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi.

Permendikbud yang mengatur tentang RPP di atas juga telah diperbarui dengan Permendikbud Republik Indonesia No 103 Tahun 2014 mengenai pembelajaran pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berbagai prinsip dalam mengembangkan atau menyusun RPP (2014: 7-8) yang akan dijelaskan berikut ini :

- a) Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual (KD dari KI-1), sosial (KD dari KI-2), pengetahuan (KD dari KI-3), dan keterampilan (KD dari KI-4).
- b) Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.
- c) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
- d) Berpusat pada peserta didik proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar, menggunakan pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan.
- e) Berbasis konteks proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar.

- f) Berorientasi kekinian pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan nilai-nilai kehidupan masa kini.
- g) Mengembangkan kemandirian belajar pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri.
- h) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
- i) Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau antarmuatan RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
- j) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

Selanjutnya, berdasarkan Materi Pelatihan Guru Implementasi K13

SMP komponennya dimuat sebagai berikut :

- (1) Nama satuan pendidikan atau Identitas Sekolah
- (2) Kelas/ semester
- (3) Materi pokok
- (4) Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai.
- (5) Kompetensi Inti (KI), merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari siswa untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran.
- (6) Komponen Dasar dan Indikator pencapaian kompetensi
- (7) Kompetensi Dasar; merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan pelajaran;
- (8) Indikator pencapaian merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (9) Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, satuan pendidikan dan potensi daerah. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Dalam

merumuskan indikator perlu memperhatikan beberapa hal di bawah ini.

- (a) Keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam KI-KD
 - (b) Indikator dimulai dari tingkatan berpikir mudah ke sukar, sederhana ke kompleks, dekat ke jauh, dan dari konkrit ke abstrak (bukan sebaliknya)
 - (c) Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan siswa.
 - (d) Indikator harus menggunakan kata kerja operasional yang sesuai.
- (10) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan dapat diorganisir, termasuk semua KD, atau diorganisir pada setiap pertemuan. Tujuan pembelajaran yang diartikulasikan dengan baik dimulai dengan menyebutkan target audiens siswa. Tujuannya kemudian daftar perilaku atau kemampuan yang perlu ditunjukkan dan kondisi yang menunjukkan perilaku atau kemampuan mana yang akan diamati. Akhirnya, tujuannya adalah untuk memasukkan tingkat keterampilan baru yang perlu dipelajari dan diukur, yaitu, berdasarkan apa kemampuan ini dapat dinilai..
- (11) Materi pembelajaran adalah rincian dari materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi.
- (12) Metode pembelajaran merupakan rincian dan kegiatan pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai.

c) Merancang Pembelajaran Efektif dan Bermakna

Implementasi Kurikulum 2013 adalah pemutakhiran kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan keterampilan dan karakter siswa. Ini membutuhkan kegiatan mengajar dalam penciptaan dan pertumbuhan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana yang direncanakan.. Saylor dalam Mulyasa (2014: 99) mengatakan bahwa *“Instruction is thus the*

implementation of curriculum plan, usually, but not necessarily, involving teaching in the sense of student, teacher interaction in an educational setting". Dalam hal ini, guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat ketika peserta didik belum dapat membentuk kompetensi dasar, apakah kegiatan pembelajaran dihentikan, diubah metodenya, atau mengulang dulu pembelajaran yang lalu. Guru harus menguasai prinsip-prinsip pembelajaran, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran, keterampilan menilai hasil-hasil belajar peserta didik, serta memilih dan menggunakan strategi atau pendekatan pembelajaran. Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan bagian integral bagi seorang guru sebagai tenaga profesional, yang hanya dapat dikuasai dengan baik melalui pengalaman praktek yang intensif.

d) Mengorganisasikan Pembelajaran

Implementasi program K13 mengharuskan guru dapat mengatur pembelajaran secara efektif. Setidaknya lima elemen harus diperhitungkan dalam kaitannya dengan organisasi pembelajaran saat pelaksanaan K13, yaitu implementasi pembelajaran, rekrutmen dan rujukan spesialis, penggunaan sumber daya lingkungan dan masyarakat, serta pengembangan dan penataan kebijakan.

e) Memilih dan Menentukan Pendekatan Pembelajaran

Di samping pendekatan pedagogi, pelaksanaan pembelajaran dalam implementasi Kurikulum 2013 berbasis kompetensi dianjurkan juga untuk menggunakan pendekatan andragogi, yang berbeda dengan pedagogi,

terutama dalam pandangannya terhadap peserta didik. Pedagogi diartikan sebagai *“the art and science of teaching children”*, sedangkan andragogi diartikan sebagai *“the art and sciences of helping adults learn”*, (Knowles dan Cross dalam Mulyasa 2014: 107). Kata *“helping”* mengandung arti bahwa andragogi menempatkan peran peserta didik lebih dominan dalam pembelajaran, yang meletakkan perhatian dasar terhadap individu secara utuh. Belajar dipandang sebagai proses yang melibatkan diri dalam interaksi antara diri sendiri dengan realita di luar diri individu yang bersangkutan. Hal tersebut sejalan dengan Tyler dalam Mulyasa (2014: 107) yang mengemukakan bahwa belajar adalah *“..... interaction between the learner and the external condition”*.

Berkenaan dengan implementasi program 2013, pembelajaran harus dianggap sebagai kegiatan psikologis yang membutuhkan dorongan eksternal. Oleh karena itu, perlu mencari antara lain. Belajar adalah sebuah aktivitas psikologis sehingga memerlukan dorongan dari luar. Maka perlu diupayakan hal berikut untuk menunjang terlaksananya K13 dengan baik :

- a) Belajar perlu dikaitkan dengan seluruh kehidupan peserta didik agar dapat menumbuhkan kesadaran mereka terhadap manfaat dari perolehan belajar.
- b) Bagaimana memotivasi peserta didik, dan bagaimana materi belajar harus dikemas sehingga bisa membangkitkan motivasi, gairah dan nafsu belajar

Kaitannya dengan hal tersebut maka dalam proses pembelajaran paling penting adalah soal apa yang dipelajari peserta didik, bukan apa kehendak dari guru sendiri. Pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik merupakan kebutuhan mereka, bukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitator/guru.

(1) Menjalankan Proses Pembelajaran, Pembentukan Kompetensi, dan Karakter

Pembelajaran dalam keberhasilan implementasi kurikulum 2013 adalah seluruh proses pembelajaran, pelatihan keterampilan dan karakter siswa yang direncanakan. Untuk tujuan ini, keterampilan dasar, keterampilan dasar, peralatan standar, indikator hasil pembelajaran dan waktu yang dibutuhkan harus didefinisikan sesuai dengan minat dalam belajar, sehingga siswa dapat untuk memperoleh peluang dan pengalaman belajar yang optimal. Dalam hal ini, belajar pada dasarnya adalah proses interaksi antara siswa dan lingkungannya, sehingga perilaku berkembang ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi ini, banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal dari individu maupun faktor eksternal dari lingkungan.

Kegiatan pembelajaran mencakup kegiatan awal atau pembukaan, kegiatan inti atau pembentukan kompetensi dan karakter, serta kegiatan akhir atau penutup.

(2) Menetapkan Kriteria Keberhasilan

Keberhasilan implementasi kurikulum 2013 dalam melatih keterampilan dan karakter siswa dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Dalam hal proses, pelatihan keterampilan dan karakter dikatakan berhasil dan berkualitas jika semua atau setidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik,

mental, maupun social dalam proses pembelajaran, di samping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil, proses pembentukan kompetensi dan karakter dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%). Lebih lanjut pembentukan kompetensi dan karakter dikatakan berhasil dan berkualitas apabila masukan merata, menghasilkan output yang banyak dan bermutu tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat dan pembangunan.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut di atas perlu dikembangkan pengalaman belajar yang kondusif untuk membentuk manusia yang berkualitas tinggi, baik mental, moral, maupun fisik. Hal ini berarti kalau tujuannya bersifat afektif psikomotorik, tidak cukup hanya diajarkan dengan modul, atau sumber yang mengandung nilai kognitif. Namun perlu penghayatan yang disertai pengalaman nilai-nilai karakter yang dimanifestasikan dalam perilaku (*behavioral skill*) sehari-hari. Metode dan strategi pembelajaran yang kondusif untuk hal tersebut perlu dikembangkan. Penggunaan metode dan strategi tersebut diharapkan setiap peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara optimal, sehingga akan lebih cepat dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat apabila mereka telah menyelesaikan suatu program pendidikan. Permendikbud ini sekarang telah diperbarui dengan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 pembelajaran pada

pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang menyatakan bahwa Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri dan / atau dalam kelompok di sekolah / madrasah yang dikoordinasikan, difasilitasi, dan diawasi oleh direktur / madrasah. Pengembangan rencana pelajaran juga dapat dilakukan oleh guru dalam kelompok antar sekolah atau antar daerah, dikoordinasikan, difasilitasi, dan diawasi oleh dinas pendidikan atau kantor kementerian agama setempat (2014: 7).

Selama pelaksanaannya, berbagai prinsip harus dipertimbangkan dalam elaborasi dan penyusunan RPP, berdasarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran di pendidikan dasar dan menengah. Berbagai prinsip dalam mengembangkan atau menyusun RPP (2014: 7-8) yang akan dijelaskan berikut ini :

- (a) Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual (KD dari KI-1), sosial (KD dari KI-2), pengetahuan (KD dari KI-3), dan keterampilan (KD dari KI-4).
- (b) Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.
- (c) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
- (d) Berpusat pada peserta didik proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar, menggunakan pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan.
- (e) Berbasis konteks proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar.

- (f) Berorientasi kekinian pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan nilai-nilai kehidupan masa kini.
- (g) Mengembangkan kemandirian belajar pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri.
- (h) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
- (i) Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau antarmuatan RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
- (j) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

f) Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013

Implementasi proses belajar mengajar dalam pelaksanaan program 2013 adalah perwujudan dari RPP, yang berisi seluruh proses pembelajaran, pelatihan keterampilan dan karakter siswa. Dengan tujuan ini keterampilan dasar, keterampilan dasar, bahan standar, indikator hasil pembelajaran dan waktu yang dialokasikan untuk minat belajar memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman dan pengalaman belajar yang optimal. dan untuk mencapai tujuan pendidikan mereka. Implementasi pembelajaran melibatkan interaksi antara guru dan siswa dan dengan lingkungan. Oleh karena itu diharapkan perilaku positif akan berkembang pada siswa, menggunakan pengalaman mereka selama interaksi. Selama implementasi pembelajaran, model pembelajaran akan muncul yang telah dibahas dalam konsep dasar kurikulum 2013. Berdasarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia, Nomor 103 tahun 2014, menjelaskan bahwa pembelajaran sesuai dengan standar proses sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran, yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan utama dan kegiatan penutupan (2014: 10). Kegiatan-kegiatan tersebut akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut (2014: 10).

(1) Kegiatan Pendahuluan

Kegiatan pendahuluan guru melakukan aktivitas berupa :

- (a) mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan;
- (b) mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan;
- (c) menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari;
- (d) menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan; dan
- (e) menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.

(5) Kegiatan Inti

Kegiatan Inti adalah proses belajar keterampilan, dilakukan dengan cara yang interaktif, menginspirasi, menyenangkan, merangsang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dan menyediakan ruang yang cukup untuk inisiatif, kreativitas dan kemandirian berdasarkan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis para peserta didik. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Dalam setiap kegiatan guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar dari KI-1 dan KI-2 antara lain mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerja sama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP.

(6) Kegiatan Penutup

Kegiatan penutup terdiri atas:

- (a) Kegiatan guru bersama peserta didik yaitu: (a) membuat rangkuman/simpulan pelajaran; (b) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan; dan (c) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan

- (b) Kegiatan guru yaitu: (a) melakukan penilaian; (b) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan (c) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

g) Penilaian Pembelajaran Kurikulum 2013

Penilaian proses dan hasil belajar menurut permendikbud No 22 tahun

2016 yaitu:

“Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assesment*) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional (*instructional effect*) pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring (*nurturant effect*) pada aspek sikap. Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan (*remedial*) pembelajaran, pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat: tes lisan/perbuatan, dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran” (2016: 13).

Penilaian bertujuan untuk menjamin bahwa proses dan kinerja yang dicapai telah sesuai dengan rencana dan tujuan (Mulyasa, 2014: 136).

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian disebutkan bahwa penilaian hasil belajar siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut (2016: 4-5)

- (a) Sahih, berarti penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
- (b) Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai.
- (c) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- (d) Terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
- (e) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
- (f) Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik;
- (g) Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
- (h) Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan
- (i) Akuntabel, berat penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasil

Hal berikut ini perlu diperhatikan oleh pendidik yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian (2016: 7).

- (a) Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus;
- (b) Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru kelas;
- (c) Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
- (d) Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/ atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
- (e) Peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi; dan
- (f) Hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan/ atau deskripsi.

Menurut Bab V Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2016, evaluasi hasil dan proses pembelajaran

menunjukkan bahwa evaluasi proses pembelajaran menggunakan metode penilaian asli yang menilai kesiapan, proses dan hasil belajar siswa. Integrasi penilaian tiga komponen akan menggambarkan kemampuan, gaya dan hasil belajar siswa yang dapat menghasilkan efek pedagogis dan efek menguntungkan pada aspek-aspek tertentu dari sikap. Guru menggunakan hasil penilaian otentik untuk merencanakan program pembelajaran, program pengayaan atau layanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai pendukung untuk meningkatkan proses pembelajaran sesuai dengan standar evaluasi pedagogis. Penilaian proses pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran menggunakan alat: kartu observasi, kuesioner sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. Penilaian hasil pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran dan pada akhir unit pembelajaran menggunakan metode dan alat: tes lisan / tertulis dan tes tertulis. Hasil penilaian akhir diperoleh dari kombinasi evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran (2016:13).

Hasil dari pernyataan di atas menyimpulkan bahwasanya penilaian otentik dilakukan pada aspek proses, hasil, dan bahkan pada kesiapan siswa sendiri

4. Pendidikan Jasmani

a. Pengertian Penjasorkes

Dalam UU No 20 tahun 2003 Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan dan bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran fisik, keterampilan motorik kritis,

pemikiran kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek cara hidup yang sehat dan pembentukan lingkungan yang bersih melalui kegiatan fisik, olahraga, dan kesehatan yang ditargetkan secara sistematis yang direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan sebagai proses pembangunan manusia seumur hidup, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sekolah memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan siswa kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam berbagai pengalaman belajar. belajar melalui kegiatan fisik, olahraga dan kesehatan tertentu. sistematis. Laporan pengalaman belajar bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis yang lebih baik, sambil membangun gaya hidup sehat dan beradaptasi sepanjang hidup. Dalam buku *Children Moving* bahwa anak membutuhkan pendidikan jasmani karena pendidikan tersebut akan meningkatkan kesehatan fisik apabila dilakukan secara teratur, mengembangkan keterampilan motorik, meningkatkan kebugaran fisik yang baik, menguatkan pada pelajaran lain, melatih disiplin diri dan menetapkan tujuan yang akan dicapai (Graham dan Parker, 2010: 5).

Pendidikan memiliki sasaran pedagogis, oleh karena itu pendidikan kurang lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, karena gerak sebagai aktivitas jasmani adalah dasar bagi manusia untuk mengenal dunia dan dirinya sendiri secara alami berkembang searah dengan perkembangan zaman. Pendidikan jasmani ketika memasuki masa pertumbuhan maka penekanannya adalah pada peningkatan kesehatan dengan

membuat orang sehat secara fisik. Tapi tidak mengesampingkan aspek lain yang lebih penting dari aktivitas fisik. Pada tahun 1910, Clark Hetherington sebagai salah satu pemimpin awal dalam pendidikan jasmani, mengusulkan bahwa pendidikan jasmani harus membahas 4 bidang yang berbeda yang menjadi perhatiannya yaitu organik, psikomotor, intelektual dan karakter (Lund dan Kirk, 2010: 229).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, ini akan menjadi peluang untuk menyempurnakan program komprehensif untuk mencapai tujuan Sistem Pendidikan Nasional. pendidikan nasional. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah cara untuk mempromosikan pertumbuhan fisik, perkembangan psikologis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, apresiasi nilai-nilai (emosional, olahraga, spiritualitas, dan mentalitas masyarakat) dan kebiasaan sehat yang merangsang pertumbuhan seimbang dan pengembangan kualitas fisik dan psikologis. Pengertian jasmani menurut Abdul Ghofur yang dikutip Juliantine (2006: 11) adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematis melalui kegiatan jasmani yang intensif dalam rangka memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak.

Dari beberapa pengertian pendidikan jasmani tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani adalah bagian pendidikan secara

keseluruhan yang menggunakan aktivitas fisik yang terpilih dan terencana yang bertujuan menciptakan kesegaran jasmani, mental, intelektual, emosional, dan sosial dapat menciptakan rasa estetika pada pelaku pendidikan jasmani.

b. Tujuan Penjasorkes

Menurut Thomas, Lee dan Thomas, (2000: vii-viii), bahwa pendidikan jasmani untuk SMP mempunyai dua tujuan yang khas, yaitu:

- 1) Untuk membuat gerakan dan olahraga pola yang lebih efisien sehingga siswa dapat menerapkannya dalam olahraga khusus dan juga untuk menekankan ekspresi kreatif dan mendorong siswa untuk menciptakan bentuk-bentuk baru dari permainan.
- 2) Mengembangkan dan atau mempertahankan kebugaran fisik serta memasukkan kegiatan ini ke dalam rencana pelajaran harian.

Dalam Standard Isi (BNSP 2006: 208) Penjasorkes memiliki tujuan supaya siswa mempunyai ketrampilan sebagai berikut

- 1) Mengembangkan keterampilan manajemen diri dalam pengembangan dan pemeliharaan kebugaran dan hidup sehat melalui kegiatan fisik dan olahraga tertentu.
- 2) Meningkatkan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis yang lebih baik.
- 3) Tingkatkan keterampilan dasar dalam bergerak

- 4) Untuk meletakkan dasar karakter moral yang kuat dengan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- 5) Mengembangkan sportivitas, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, kepercayaan, dan demokrasi.
- 6) Kembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.
- 7) Memahami konsep aktivitas fisik dan praktik di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, gaya hidup dan kebugaran yang sehat, berkualitas dan memiliki sikap positif.

Dari pendapat yang telah dikemukakan tersebut, tujuan yang akan dicapai dari pendidikan jasmani secara umum adalah meningkatkan perkembangan jasmani (olah tubuh), perkembangan sosial, dan perkembangan mental.

Penerapan pendidikan jasmani di SMP harus melalui beberapa tahapan, guru harus mengetahui tentang petunjuk-petunjuk bagaimana mengajar supaya tidak salah. Guru harus memiliki rencana pembelajaran dan dalam rencana pembelajaran itu telah tersusun dengan baik yang meliputi bagian-bagian yang berbeda. Ada tujuan pembelajaran, peralatan dan bahan, tips keamanan,

pemanasan kegiatan, kegiatan pengembangan keterampilan, dan kegiatan penutup (Thomas, lee & Thomas, 2000: XV)

c. Ruang Lingkup PJOK SMP

Ruang lingkup PJOK SMP dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 yang terdiri dari Kompetensi Inti dan Komepetnsi Dasar dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar PJOK SMP/MTs Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 (2016 : 2-6)

Kelas : VII

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata	4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

KOMPETENSI DASAR 4 (KETERAMPILAN)	KOMPETENSI DASAR 3 (PENGETAHUAN)
4.1. Mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional	3.1. Memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional*)
4.2. Mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. *)	3.2. Memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. *)
4.3. Mempraktikkan gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. *)	3.3. Memahami gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. *)

4.4. Mempraktikkan gerak spesifik seni beladiri. **)	3.4. Memahami gerak spesifik seni beladiri. **)
4.5. Mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan (daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan) dan pengukuran hasilnya	3.5. Memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan (daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan) dan pengukuran hasilnya
4.6. Mempraktikkan berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai	3.6. Memahami berbagai keterampilan dasar spesifik senam lantai
4.7. Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan dalam aktivitas gerak berirama	3.7. Memahami variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan dalam aktivitas gerak berirama
4.8. Mempraktikkan konsep gerak spesifik salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik.	3.8. Memahami gerak spesifik salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik.
4.9. Memaparkan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik sekunder dan mental.	3.9. Memahami perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik sekunder dan mental.
4.10. Memaparkan pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan	3.10. Memahami pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan.

Kelas : VIII

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)	KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)
3. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang	4. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

sama dalam sudut pandang/teori	
-----------------------------------	--

KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
4.1 Mempraktikkan variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional	3.1 Memahami variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional
4.2 Mempraktikkan variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional	3.2 Memahami variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional
4.3 Mempraktikkan variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional	3.3 Memahami variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional
4.4 Mempraktikkan variasi gerak spesifik seni beladiri	3.4 Memahami variasi gerak spesifik seni beladiri
4.5 Mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan (kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi) serta pengukuran hasilnya	3.5 Memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan (kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi) serta pengukuran hasilnya
4.6 Mempraktikkan kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai	3.6 Memahami kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai
4.7 Mempraktikkan prosedur variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan dan inti latihan dalam aktivitas gerak berirama	3.7 Memahami variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan dan inti latihan dalam aktivitas gerak berirama
4.8 Mempraktikkan gerak spesifik salah satu gaya renang dalam permainan air dengan atau tanpa alat ***)	3.8 Memahami gerak spesifik salah satu gaya renang dalam permainan air dengan atau tanpa alat ***)
4.9 Memaparkan perlunya pencegahan	3.9 Memahami perlunya pencegahan terhadap “bahaya pergaulan bebas”

terhadap “bahaya pergaulan bebas”	
4.10 Memaparkan cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya	3.10 Memahami cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya

Kelas : IX

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)	KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori	3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
4.1 Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional	3.1 Memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional
4.2 Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. *)	3.2 Memahami kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. *)
4.3 Mempraktikkan kombinasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. *)	3.3 Memahami kombinasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. *)
4.4 Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik seni beladiri. **)	3.4 Memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik seni beladiri. **)
4.5 Mempraktikkan penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana.	3.5 Memahami penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana
4.6 Mempraktikkan kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana secara konsisten,	3.6 Memahami kombinasi keterampilan berbentuk rangkaian gerak sederhana secara konsisten,

tepat, dan terkontrol dalam aktivitas spesifik senam lantai	tepat, dan terkontrol dalam aktivitas spesifik senam lantai
4.7 Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan, inti latihan, dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama	3.7 Memahami variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama (ketukan) tanpa/dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan, inti latihan, dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama
4.8 Mempraktikkan gerak spesifik salah satu gaya renang dalam bentuk perlombaan ***)	3.8 Memahami gerak spesifik salah satu gaya renang dalam bentuk perlombaan ***)
4.9 Memaparkan tindakan P3K pada kejadian darurat, baik pada diri sendiri maupun orang lain	3.9 Memahami tindakan P3K pada kejadian darurat, baik pada diri sendiri maupun orang lain
4.10 Memaparkan peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit	3.10 Memahami peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit

Keterangan:

*) Untuk keterampilan dasar dalam permainan bola besar dan permainan bola kecil dapat dipilih tergantung pada infrastruktur yang tersedia. (Dan tentu saja guru tidak mengajarkan salah satu pelajaran yang menarik baginya, tetapi dicari oleh murid-muridnya sehingga siswa tidak dipaksa dan PJOK menjadi momok bagi siswa mereka.)

**) Selain kegiatan pencak silat, kegiatan belajar bela diri juga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah (karate, judo, taekwondo, dll). Seni bela diri pencak silat mulai diajarkan di kelas IV karena karakteristik psikis kelas I, II dan III tidak cukup untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan pembelajaran seni bela diri.

***) Pembelajaran kegiatan air dapat dilakukan sesuai dengan kondisi, jika tidak dapat dilaksanakan diganti dengan kegiatan fisik lain yang terkandung dalam isi materi.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Kajian teori yang dilakukan perlu didukung dengan pengamalan konkret di lapangan mengenai implementasi Kurikulum 2013. Perlu disampaikan penelitian-penelitian yang relevan dengan hasil penelitian ini. Hasil penelusuran kepustakaan ditemukan 2 penelitian yang relevan. Inti dari 2 penelitian tersebut dikemukakan dalam uraian berikut ini.

1. Penelitian Andri Noviatmi dengan judul, “Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Kelas I & IV SD di Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 2014/2015”. Dari penelitian ini Andri Noviatmi menemukan beberapa komponen implementasi kurikulum diantaranya (1) kondisi siswa, (2) kondisi guru, (3) pemahaman guru terhadap kurikulum, (4) kondisi sarana prasarana, (5) perencanaan pembelajaran, (6) pelaksanaan pembelajaran tematik integratif berbasis saintifik, (7) pelaksanaan penilaian autentik, dan (8) hasil penilaian autentik terkait aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) untuk mengimplementasi Kurikulum 2013 kondisi siswa berkategori cukup (54,9%) dan kondisi guru berkategori cukup (57,8%); (2) pemahaman guru terhadap Kurikulum 2013 berkategori baik (62,2%); (3) dalam implementasi Kurikulum 2013, perencanaan pembelajaran berkategori sangat baik (85%), pelaksanaan pembelajaran tematik integratif berbasis saintifik berkategori sangat baik (90%), pelaksanaan penilaian autentik berkategori cukup (53,3%), dan hasil penilaian autentik berkategori sangat baik (100%). Hasil penelitian menunjukkan belum semua komponen memenuhi standar. Oleh karena itu, diberikan rekomendasi terhadap komponen implementasi Kurikulum 2013.
2. Penelitian Estika Kapiyani dengan judul, “Efektifitas Implementasi Kurikulum 2013 pada Enam Sekolah Sasaran SMA di Kabupaten Bantul Tahun 2015/2016”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui keefektifan implementasi Kurikulum 2013 pada kepemimpinan kepala sekolah, persiapan guru mengajar, proses pembelajaran, sistem penilaian dan pemanfaatan sarana

prasarana dan 2) mHasil penelitian menunjukkan: 1) kepemimpinan kepala sekolah di enam sekolah sasaran SMA baik sesuai kriteria kepemimpinan dalam Kurikulum 2013, 2) persiapan mengajar dilaksanakan cukup efektif sesuai dengan kriteria pelaksanaan pembelajaran saintifik, 3) proses pembelajaran cukup efektif sesuai dengan kriteria pelaksanaan Kurikulum 2013, 4) sistem penilaian efektif dan sesuai dengan rambu-rambu penilaian otentik, 5) buku pegangan guru dan peserta didik yang tersedia cukup memadai dalam menunjang proses pembelajaran yang sesuai dengan kriteria pelaksanaan Kurikulum 2013, 6) hasil belajar peserta didik melalui ujian sekolah sudah menunjukkan efektifitas diatas nilai Kriteria Kompetensi Minimal Implementasi Kurikulum 2013 yaitu > 65 mengungkapkan hasil belajar siswa di enam sekolah SMA sasaran.

C. Kerangka Berpikir

Tujuan dari Pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan memiliki peran dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan memiliki karakter mulia. Maka diperlukan sistem pendidikan yang memiliki kualitas yang baik sehingga cita-dita tersebut dapat diwujudkan. Perubahan zaman menuntut penyediaan sumber daya manusia yang berdaya saing unggul untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah baik dari perubahan teknologi, sosial budaya dan ekonomi. Perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan kita dimaksudkan untuk senantiasa mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman untuk mendidik generasi bangsa sesuai dengan tantangan dan tuntutan zamannya.

Kurikulum yang terus diperbarui belum menjamin secara otomatis untuk meningkatkan mutu pendidikan karena kurikulum harus diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Dalam proses pembelajaran di kelas melibatkan banyak faktor yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Melihat dari cara pandang sekolah faktor-faktor penentu jalanya implementasi kurikulum mencakup kepala sekolah, guru, siswa dan sarana prasarana sekolah. Mereka adalah pelaku di lapangan yang mengolah faktor implementasi kurikulum di sekolah. Kemungkinannya implementasi itu dapat berjalan dengan baik, menemui hambatan, atau bahkan menemui kegagalan.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan kerangka pikir di atas, selanjutnya dapat diturunkan menjadi sejumlah pertanyaan penelitian yang dapat dijadikan petunjuk awal bagaimana proses penelitian ini dilakukan. Pertanyaan pokok penelitian yang diajukan adalah “bagaimana proses implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SMP Kabupaten Bantul”. Berdasarkan dari pertanyaan pokok peneliti tersebut, selanjutnya dapat dirinci menjadi tiga butir pertanyaan berikut ini.

1. Bagaimana implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran PJOK di Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung guru PJOK dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013?
3. Apakah hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh PJOK dalam implementasi kurikulum 2013?